

PENERAPAN NILAI-NILAI MARHAENISME PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PROVINSI JAMBI

Yauman Syarif Anggadifa¹, Esteria Tamba², SR. Krisdianto³

^{1 2 3} Ilmu Politik, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

E-mail: srkrisdianto@gmail.com

ABSTRAK

Kepentingan politik terbentuk atas satu kesamaan ideologi tertentu. Ideologi menjadi pegangan bagi setiap kader partai dalam mengimplementasikan nilai-nilai ideologi tersebut menjadi program, kegiatan atau aktifitas partai di dalam kehidupan masyarakat. Kajian mengenai hal tersebut dilakukan karena ideologi seringkali tidak dijadikan pedoman dalam pembuatan kebijakan, ideologi masih dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya abstrak. Penelitian ini membahas tentang ideologi Marhaenisme yang digagas oleh Soekarno serta bentuk penerapannya pada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi dan wajah kebijakan atau peraturan yang diperjuangkan oleh fraksi. Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk penerapan nilai-nilai Marhaenisme yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi berupa arahan dan perintah partai kepada petugas partai di Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jambi untuk memperjuangkan kesejahteraan sosial, pembangunan manusia, pertanian, UMKM dan infrastruktur yang berpihak kepada kaum marhaen. Corak keberpihakan PDI Perjuangan terhadap kaum marhaen adalah hadirnya peraturan daerah tentang disabilitas, pansus konflik lahan. dalam menanggapi aspirasi masyarakat untuk dimasukkan kedalam pokok-pokok pikiran DPRD, Anggota Fraksi PDI Perjuangan memprioritaskan terhadap kebutuhan petani serta pemberdayaan UMKM. posisi politik PDI Perjuangan di Provinsi Jambi sebagai mayoritas hal ini menjadikan salah satu kadernya menjadi Ketua DPRD Provinsi Jambi dengan posisi ini PDI Perjuangan melibatkan para pemangku kepentingan atau mitra kerja agar kebijakan serta anggaran dapat difokuskan kepada kesejahteraan yang bersentuhan langsung dengan kaum marhaen. Proses tersebut juga sebagai landasan bahwa perjuangan untuk kesejahteraan wong cilik merupakan suatu keharusan dan meyakini bahwa apa yang menjadi dasar perjuangan partai merupakan acuan bergerak dalam upaya pencapaian kesejahteraan tersebut. Kader PDI Perjuangan memahami bahwa bahwa asas partai yang tercantum dalam AD/ART adalah Pancasila dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945 dengan nilai Marhaenisme sebagai intisari dari lima prinsip pokok dalam Pancasila.

Kata Kunci: Ideologi, Marhaenisme, PDI Perjuangan, Wong Cilik

THE APPLICATION OF MARHAENISM VALUES IN THE BOARD OF REGIONAL LEADERS OF THE INDONESIAN DEMOCRACY PARTY THE STRUGGLE OF JAMBI PROVINCE

ABSTRACT

Political interests are formed on a certain ideological similarity. Ideology becomes a guide for every party cadre in implementing these ideological values into programs, activities or party activities in people's lives. Studies on this subject are often not used as guidelines for policy making, ideology is still seen as something abstract. This study discusses the ideology of Marhaenism initiated by Soekarno and the form of its application to the DPD PDI Perjuangan Jambi Province and the face of policies or regulations championed by the faction. This study was designed using a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the form of application of Marhaenism values carried out by the DPD PDI Perjuangan Jambi Province is in the form of directives and orders to party officials in the PDI Perjuangan faction of the Jambi Province DPRD for social welfare, human development, agriculture, UMKM and infrastructure that favors to wong cilik. The pattern of PDI Perjuangan's alignment with the marhaen is the presence of regional regulations on disability, special committees for land conflicts. In responding to the aspirations of the people to be included in the main ideas of the DPRD, members of the PDI Perjuangan faction prioritize the needs of farmers and empowering UMKM. The political position of the PDI Perjuangan in Jambi Province as the majority, this made one of its cadres the Chair of the Jambi Provincial DPRD with this position the PDI Perjuangan involved stakeholders or policy partners so that policies could support welfare directly with the marhaen. This process also serves as the basis that the

struggle for the welfare of wong cilik is a must and the belief that what forms the basis of a party's struggle is the struggle for that welfare. PDI Perjuangan cadres understand that as a party listed in the AD/ART is Pancasila with the soul and spirit of its birth on June 1, 1945 with the value of Marhaenism as the essence of the main principles in Pancasila.

Keywords: Ideology, Marhaenism, PDI Perjuangan, Wong Cilik

* Corresponding Author. Tel: SR. Krisdianto
E-mail: srkrisdianto@gmail.com

PENDAHULUAN

Partai Politik dan Ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan. Ideologi harus melekat pada kehadiran suatu partai politik. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta dalam proses pengelolaan negara (Miriam, 2017).

Neumann berpendapat bahwa partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi. Keberadaan ideologi dalam sebuah partai menjadi pedoman nilai dalam melakukan program dan aktifitas kerja politik adalah hal yang penting. Disini dapat dikatakan bahwa partai politik menyiratkan suatu cara berpikir yang mewarnai dan memengaruhi cara sikap dan berperilaku yang diperlihatkan oleh orang-orang dalam suatu kelompok sosial (Navarin dan Citra, 2017).

Ideologi adalah hal wajib yang menjadi pegangan bagi setiap kader dan pengurus partai dalam mengimplementasikan nilai-nilai ideologi tersebut menjadi program, kegiatan atau aktivitas partai di dalam kehidupan masyarakat. Setiap partai politik terbentuk berdasarkan pada ideologi dan nilai-nilai yang hendak diusungnya. yang kemudian menjadi identitas partai serta basis perjuangan atau cita-cita yang ingin dicapai suatu partai politik.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada ideologi hasil pemikiran Soekarno yakni Marhaenisme. Gagasan Marhaenisme lahir dari perjumpaan Soekarno dengan seorang petani di Bandung bernama Marhaen yang hidup di Indonesia pada tahun 1926-1927 (Asmaeny, 2017). Marhaenisme merupakan paham, ideologi, teori perjuangan, ilmu perjuangan suatu bangsa dan praktik perjuangan untuk mengangkat derajat dan martabat kaum marhaen Indonesia. Soekarno mencetuskan marhaenisme, yakni sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi (Melik, 2018)

Marhaenisme adalah perjuangan mewujudkan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. sosio-nasionalisme adalah prinsip kebangsaan dan semangat kebangsaan menjunjung tinggi perikemanusiaan dan

sosio-demokrasi adalah demokrasi yang berorientasi keadilan sosial, yang tidak hanya menghendaki partisipasi dan persamaan di bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi. Marhaenisme merupakan cara perjuangan untuk mencapai susunan masyarakat dan susunan negeri yang sedemikian itu, oleh karenanya, harus dengan suatu cara perjuangan revolusioner yakni dengan Marhaenisme (Soekarno, 2017).

PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Soekarno, Marhaenisme dan wong cilik. lima variabel itu menjadi identitas kuat dan sulit dipisahkan satu sama lain. PDI Perjuangan bisa besar tidak lepas dari figur Megawati. Variabel lain seperti sosok Bung Karno dan Marhaenisme sangat menentukan dalam menciptakan kader PDI Perjuangan yang loyal dan militan. Menurut Tjahjo Kumolo yang merupakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan 2010-2015 menjelaskan bahwa perjuangan yang panjang itu terjadi karena spirit perjuangan yang dilandaskan pada ideologi dan pemahaman terhadap nasionalisme. Pemikiran dasar nasionalisme kerakyatan yang menjadi ideologi perjuangan PDI Perjuangan tersebut tidak terlepas dari pemikiran Soekarno. Nasionalisme kerakyatan PDI Perjuangan di dasarkan pada tiga gagasan utama Soekarno yakni; Marhaenisme, Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti (Imran, 2015). PDI Perjuangan khas dikenal dengan ciri utama pada konsolidasi ideologi yang dicirikan oleh pemahaman terhadap prinsip Nasionalisme, kerakyatan, dan keadilan sosial (Markus, 2013).

Sebagai partai ideologis posisi PDI Perjuangan sangat jelas Partai tidak akan pernah menjadi bagian dari kekuasaan yang tidak berpihak pada wong cilik. Dalam pidatonya Megawati juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan menatap dengan penuh optimisme bahwa partai ini adalah partai milik wong cilik dan dipersembahkan bagi rakyat kecil (Megawati, 2010). Dewasa ini ada contoh kasus dari kebijakan atau pernyataan rezim saat ini yang justru kontradiktif dengan pengakuan sebagai partai kaum Marhaen. Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menjelaskan bahwa PDI Perjuangan dianggap tidak konsisten sebagai

partai yang membela nasib wong cilik. Keputusan petugas partainya yakni Presiden Jokowi mengerek naik harga BBM dikhawatirkan berdampak kepada masyarakat kelas bawah dan menengah. Tentu saja, kondisi ini bisa memicu terjadinya konflik sosial seperti halnya pada 1998 silam. PDI Perjuangan yang dikenal melekat dengan wong cilik, paling keras menentang kenaikan BBM kini malah menjadi pelaku atau pendukung (Iwan, 2014)

Praktik politik Indonesia terdapat permasalahan ideologi partai politik yang sering terjadi adalah seringkali ideologi tersebut tidak dijadikan pedoman dalam pembuatan kebijakan. Ideologi masih dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya abstrak. Ideologi bukan lagi dianggap agama politik. Bukankah turunan dari suatu ideologi itu adalah “prinsip”. Orang yang lemah dalam memegang teguh ideologinya berarti lemah dalam berprinsip (Navarin dan Citra, 2017). Kelemahan dalam berprinsip atau memegang teguh nilai ideologis berakibat pada tidak dapat terwujud sebuah kondisi ideal, Padahal dari ideologi lah semuanya berawal. Bagaimana partai politik membangun visi dan misi, strategi hingga program kerja semua terkait dengan ideologi. Akibatnya sekarang sulit bagi publik membedakan mana sebenarnya partai berideologi Islam dan mana partai berideologi nasionalis. Tidak adanya niat dan tekanan dari publik akan pentingnya sebuah ideologi ini juga akan menyulitkan pemilih dalam memberikan posisi bagi masing-masing partai politik. Karena pada akhirnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dalam hal program kerja antara satu partai dengan partai lainnya (Firmanzah, 2011). Menurut Firmanzah dukungan besar sulit diperoleh tanpa ideologi yang jelas dan dikomunikasikan kepada pemilih. Karena itulah masing-masing partai politik harus memperjelas ideologi yang mereka anut agar memudahkan posisi dan mengemas bahasa komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat dan dengan nilai-nilai seperti apa perjuangan itu akan dilakukan, bentuk masyarakat seperti apa yang akan dibentuk. Dengan dasar ideologi atau nilai-nilai dari sebuah ajaran ideologi lah partai akan

bergerak melalui program kebijakan partai yang kemudian akan menjadi program kerja nyata yang bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat yang kemudian melalui program kerja inilah cita-cita untuk membentuk masyarakat yang diimpikan akan terwujud. Berdasarkan latar belakang di atas, Penelitian ini akan melihat orientasi Nilai-nilai Marhaenisme di DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi dalam menjalankan partai. Pemilihan Provinsi Jambi sebagai lokasi penelitian adalah karena PDI Perjuangan di Provinsi Jambi memiliki dukungan signifikan dari rakyat. Ini ditandai dengan perolehan sebesar 264.032 suara pada Pemilihan legislatif DPRD Provinsi Jambi tahun 2019 dimana PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (DPRD Provinsi Jambi) yakni sembilan kursi dari 55 kursi DPRD Provinsi Jambi 46. Hal ini menjadikan PDI Perjuangan sebagai Fraksi dengan kursi terbanyak.

Melihat Posisi PDI Perjuangan yang saat ini sebagai salah satu partai besar dengan perolehan suara teratas, dan identitas PDI Perjuangan sebagai partai representasi Wong Cilik namun benarkah nilai-nilai Marhaenisme yang menekankan pada asas kerakyatan benar-benar berjalan dan diterapkan dalam PDI Perjuangan di Provinsi Jambi. Bagaimanakah jajaran pengurus, kader, ataupun sistem kepartaian melaksanakan nilai-nilai dari Marhaenisme. Penelitian ini akan melihat sejauh mana implementasi dari nilai-nilai Marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Untuk melakukan penelitian mengenai ideologi Marhaenisme dalam PDI Perjuangan, khususnya di Provinsi Jambi.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Jambi, khususnya di Kantor Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif disajikan dalam bentuk deskriptif atau naratif yang bertujuan menggambarkan secara rinci apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, mengapa, dan

sejenisnya tentang subjek yang diteliti. (Sutiyono, 2018) Teknik penentuan informan adalah metode yang dipakai oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data (informan). Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan penulis teliti (Sugyiono, 2021) dengan cara ini kemudian peneliti menentukan informan yang akan dimintai informasinya berdasarkan keterlibatannya dengan objek penelitian. Informan dalam penelitian dipilih dari Unsur DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jambi, Tenaga Ahli Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Jambi dan DPC GMNI Jambi. Unsur DPD Partai dipilih karena yang dianggap paling mengerti secara internal PDI Perjuangan di Provinsi Jambi dan proses menjalankan roda organisasi partai.

Ketua Fraksi dipilih sebagai informan karena Fraksi merupakan representatif dari partai politik di DPRD yang memiliki tugas dan peran memberikan sikap politik dalam tatanan penggunaan hak bertanya, menyampaikan pandangan dan pendapat (Adityawarman, 2021). Selanjutnya Pengurus GMNI Jambi dipilih sebagai informan karena GMNI sebagai suatu organisasi yang sejak pertama kali berdiri pada tahun 1954 telah mengikrarkan diri untuk menjadikan Marhaenisme sebagai suatu Ideologi Perjuangan (Ahmad, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Nilai-Nilai Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi dalam Marhaenisme Pada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi.

Marhaenisme dalam penelitian ini adalah terkait pemikiran Soekarno mengenai dasar perjuangan untuk membebaskan diri dari segala bentuk penindasan yang menyengsarakan rakyat atau lebih spesifik

menyengsarakan kaum marhaen Indonesia. Marhaenisme di adopsi menjadi dasar dan spirit perjuangan PDI Perjuangan. Marhaenisme bagi PDI Perjuangan merupakan alat perjuangan dalam membentuk dan membangun karakter bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Gagasan Pancasila Soekarno mengandung makna Marhaenisme. Hal ini merupakan perbedaan ideologi PDI Perjuangan dengan ideologi partai lain adalah penekanan pada adanya kedekatan historis dengan ideologi PNI (Ardila dan Sri, 2013). “jika dilihat dari sisi ideologi kejelasan ideologi direpresentasikan setidaknya oleh PDI Perjuangan dan PKS. Kenapa PDI Perjuangan ya karena kalau orang melihat PDI Perjuangan ya itu jelas dengan nasionalisnya kalau orang melihat PKS juga jelas dengan berasaskan islam. kalau Partai-partai politik yang lain-lain ini kan masih abu-abu ini apa nasionalis kah, religius kah, atau islam kah atau kristen kah gitu kan. Karena kita berbicara tentang PDI Perjuangan apa yang kemudian menjadi landasan dari PDI Perjuangan kalau di flashback lagi sebetulnya adalah metamorfosis dari PNI di masa Soekarno atau orde lama. Karena punya landasan ideologis yang sama dengan PNI yang dikenal dengan Marhaenisme nah secara umum kan memang marhaen itu yang menjadi jargon PDI Perjuangan memperjuangkan kepentingan orang kecil atau wong cilik atau dalam konsep Marhaenisme disebut dengan Kaum Marhaen” (Pahrudin, 2022)

Pada dasarnya ideologi berfungsi sebagai pedoman dalam berpolitik, Menurut Firmanzah ideologi merupakan gagasan dan ide yang menyangkut bagaimana seharusnya struktur atau pola masyarakat berlangsung. Ideologi mendapatkan muatan berupa tujuan akhir dan kondisi ideal yang ingin dicapai (Firmanzah, 2011) Ideologi mengangkut impian mengenai kondisi ideal masyarakat yang hendak mereka wujudkan.

Marhaenisme sebagai ideologi melihat kondisi ideal akan masyarakat terwujud jika disparitas antara kaya dan miskin tidak berbeda secara mencolok serta lahirnya masyarakat yang adil dan makmur.

Marhaenisme disusun oleh pemikiran Soekarno, yaitu sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi. komponen inilah yang membentuk ajaran Marhaenisme. sosio-nasionalisme adalah nasionalisme yang berpihak kepada massa-rakyat. sosio-nasionalisme adalah nasionalisme yang menghendaki masyarakat adil dan makmur. kontribusi sosio-nasionalisme adalah menyediakan koridor yang aman bagi perjuangan nasional Indonesia menuju cita-cita akhirnya, yaitu masyarakat adil dan makmur. Dengan koridor itu, perjuangan nasional Indonesia tidak berhenti pada pintu gerbang kemerdekaan, tetapi berlanjut hingga masyarakat yang adil dan makmur terbentuk. sosio-demokrasi menggabungkan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. sosio-demokrasi menjadikan kaum marhaen sebagai pemegang kekuasaan politik dan juga menjamin hak seluruh rakyat.

Sejiwa dengan sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi juga menegaskan keberpihakan, yakni kepada rakyat marhaen. sosio-demokrasi menginginkan sebuah kekuasaan politik di tangan rakyat Marhaen. Paham yang digagas oleh Bung Karno ini dinilai masih relevan untuk dipraktikkan dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada di Indonesia. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak M. Asriadi selaku Wakil Ketua DPD Bidang Kaderisasi dan Ideologi PDI Perjuangan Provinsi Jambi sebagai berikut: “pada intinya Marhaenisme itu menentang keras penghisapan kepada rakyat kecil. Digagas Bung Karno tahun 1927 Marhaenisme adalah suatu bentuk pembelaan terhadap Rakyat Kecil atau Wong Cilik. Marhaenisme masih relevan hingga saat ini. Inilah Fungsi PDI Perjuangan sebagai Kaum Marhaenis hadir karena partai ini adalah partainya wong cilik, dan kita harus pro dengan rakyat kecil, dan itu akan selamanya relevan menurut saya. Walaupun perlahan-lahan akan berkurang tingkat kemiskinannya, yang namanya wong cilik tidak akan pernah habis.”

Marhaen dan Marhaenis masing-masing memiliki definisi. Marhaen yaitu kaum rakyat kecil Indonesia bukan hanya petani, nelayan dan buruh tetapi adalah seluruh rakyat kecil seperti yang dijelaskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan dalam pidatonya pada rakernas I pada tahun 2016 sebagai berikut: “oleh Bung Karno, Marhaen didefinisikan semua orang Indonesia yang melarat. Baik buruh, tani, nelayan, pegawai kantor, insinyur asal dia kecil, hanya punya apa yang ia punya sendiri maka saya namakan ia sama Marhaen”.

Marhaenis adalah setiap orang yang berjuang bersama dan membela nasib kaum marhaen serta mengangkat derajat dan martabatnya dari kondisi miskin, melarat menjadi makmur dan sejahtera lahir dan batin (bebas merdeka dan berdaulat). Nilai ideologi partai digambarkan oleh kader bahwa partai PDI Perjuangan mempunyai keberpihakan kepada wong cilik. Selain itu membumikan nilai-nilai ajaran Bung Karno khususnya yang terkenal dengan Marhaenisme dengan juga memegang teguh kandungan isi Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti sebagai nilai-nilai yang harus terus diperjuangkan oleh Tiga Pilar Partai.

Melihat dalam AD/ART PDI Perjuangan, Marhaenisme tidak tertulis secara eksplisit sebagai ideologi partai namun yang diambil adalah nilai-nilai dari konsep Marhaenisme yakni sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang tertuang dalam asas partai yakni Pancasila dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945 serta dalam watak dan arti partai yang kemudian diejawantahkan dalam konsepsi Trisakti yang digagas Bung Karno yakni Berdaulat di bidang politik, Berdikari dalam ekonomi dan Berkepribadian dalam kebudayaan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Edi Purwanto selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi sebagai berikut: “Marhaenisme merupakan spirit juang dari pada seluruh kader partai. Marhaen juga menjadi semangat untuk mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan melalui apa? Ya melalui Trisakti. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. jadi

menurut saya sih PDI Perjuangan melakukan itu. Ketua Umum kami selalu menekankan kami untuk ingat wong cilik, turun ke bawah bertemu rakyat. Hal yang tadi menjadi Spirit dan Tekad kami untuk semaksimal mungkin menciptakan mewujudkan masyarakat yang Sejahtera dan Berdikari, yakni kesejahteraan yang setara bagi segenap komponen masyarakat dan mewujudkan kondisi yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan.”

Memperjuangkan kepentingan kaum marhaen atau wong cilik berlandaskan Marhaenisme pada dasarnya adalah memperjuangkan hal-hal pokok bagi rakyat-rakyat kecil. Semangat Marhaenisme tersebut sama dengan semangat memperjuangkan hak asasi manusia hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Pahrudin HM selaku pengamat politik sebagai berikut, “secara umum memperjuangkan kepentingan wong cilik tentu saja terkait hajat atau kebutuhan dasar rakyat kecil atau wong cilik mengenai pendidikan, ekonomi, kesehatan, lapangan pekerjaan itu kan hal-hal pokok yang menjadi substansi dari hak asasi manusia pada dasarnya. Jadi memperjuangkan Marhaenisme, memperjuangkan wong cilik itu sebetulnya sama dengan memperjuangkan HAM. Korelasinya sama sebetulnya dasarnya kan begitu”

Pancasila dan spirit Marhaenis harus dijalankan oleh seluruh kader partai dan petugas partai. PDI Perjuangan juga menjadikan Trisakti sebagai pedoman dalam strategi dan tujuan kebijakan program perjuangan dalam bidang politik, ekonomi serta budaya. Ajaran Trisakti Soekarno penting diterapkan dalam mengatasi persoalan bangsa dan daerah sebab mempunyai makna dan kebijakan bagi kesejahteraan masyarakat. Tugas yang diselenggarakan oleh kader di berbagai tingkatan antara lain untuk mengamalkan Marhaenisme sebagai bentuk citra partai dan keberpihakan partai terhadap kaum rakyat kecil atau wong cilik.

Memperjuangkan Marhaen Dalam Posisi Politik Dewan Pimpinan Daerah

Ranney dan Kendal mendefinisikan partai politik sebagai grup atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk mencalonkan dan terlibat dalam pemilu dengan harapan mendapatkan serta menjalankan kontrol atas birokrasi dan kebijakan publik (Firmanzah, 2011) Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Menurut definisi ini, partai politik memang didesain untuk mampu mengarahkan pemerintahan melalui pemilu.

Selain itu, bagi PDI Perjuangan Partai merupakan wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara dengan cara membumikan ajaran-ajaran Bung Karno sebagai teori perjuangan sekaligus tujuan dari perjuangan politik. Pemahaman terkait Marhaenisme sebagai dasar perjuangan oleh setiap kader dan anggota, dimana masing-masing dari mereka menyadari bahwa nilai Marhaenisme merupakan acuan partai menentukan langkah gerak dalam usaha pencapaian tujuan yang telah dirumuskan dalam program perjuangan PDI Perjuangan. kader DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi memahami bahwa asas partai yang tercantum dalam AD/ART adalah Pancasila 1 Juni 1945 dengan nilai Marhaenisme sebagai intisari dari lima prinsip pokok dalam Pancasila 1 Juni 1945. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Asriadi sebagai berikut: “Nah marhaenisme itu sebuah paham yang sebenarnya dengan itu Bung Karno menggali Pancasila. PDI Perjuangan dengan jiwa Pancasila nya pasti sudah harus termaktub yang namanya Marhaenis di dalamnya, nah maka sebenarnya Marhaenisme itu kalau disandingkan dengan Pancasila, alatnya, semangatnya, sama. maka dasar untuk menjadi seorang Marhaenis harus gol dulu Pancasila nya. Gak mungkin menjadi seorang Marhaenis tanpa menjadi pribadi yang Pancasilais”

PDI Perjuangan menjadikan Marhaenisme sebagai spirit perjuangan kader partai yang artinya kader mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan

Ideologi Marhaenisme, arti dasar, tujuan, pengaruh serta pelaksanaan perjuangannya. Rasa kepedulian terhadap wong cilik inilah yang menjadi perhatian dari PDI Perjuangan. Turun kebawah merupakan upaya PDI Perjuangan bukan hanya mencari kekuasaan dalam berpolitik. Namun bagaimana masyarakat merasakan kehadiran PDI Perjuangan sebagai rumah untuk rakyat kecil pemahan tersebut didasarkan pada pendidikan tentang ideologi Marhaenisme yang diberikan bagi seluruh kader PDI Perjuangan. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Asriadi sebagai berikut “kalau boleh dikatakan Marhaenis itu jiwa yang terkandung dalam setiap rakyat Indonesia yang tidak ingin tertindas, yang tidak ingin bodoh, yang tidak ingin berkelamaan atau berkelanjutan dalam ketidaktahuan sehingga tanah di depan mata pun tidak bisa di garap. Maka jiwa itu muncul. Nah Bung Karno mengatakan itu namanya Marhaenisme.

Firmanzah menjelaskan bahwa Ideologi sebagai idealisasi masyarakat artinya Ideologi memiliki muatan berupa tujuan akhir dan kondisi ideal yang ingin dicapai. Pemahaman ideologi dengan dasar ini menyatakan bahwa pertempuran ideologi adalah pertempuran yang berkaitan dengan kondisi ideal masyarakat yang akan diwujudkan (Firmanzah, 2011). Dalam Pandangan GMNI Jambi sebagai organisasi yang berlandaskan Marhaenisme menjelaskan bahwa setiap individu, kelompok atau golongan yang mempelejadi ideologi Marhaenisme adalah seorang Marhaenis yang dalam gerak langkahnya senantiasa memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil. Pemahaman Marhaenisme dibentuk oleh kesadaran akan wong cilik sebagai dasar perjuangan sebagaimana yang disampaikan oleh Reinhadt P Antonio selaku Sekretaris DPC GMNI Jambi sebagai berikut, “ketika orang yang sudah mempelajari Marhaenisme dan dia telah melakukan kerja-kerja yang berlandaskan pemikiran ideologi Marhaenisme itu sudah pasti dia seorang Marhaenis. clear. ideologi Marhaenisme itu dibentuk dengan masyarakat kecil kalau kita mengadvokasi, memperjuangkan hak-hak masyarakat saya rasa itu sudah menjadi bagian dari kerja-kerja

ideologi Marhaenisme. termasuk juga membumikan nilai-nilai Pancasila, Nasionalisme rasa keindonesian persatuan dan kesatuan”.

Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*).

Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Setelah itu partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan.

Usul kebijakan ini dimasukkan ke dalam program atau platform partai (*goal formulation*) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Demikianlah tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik (Miriam, 2017).

Upaya mewujudkan nilai-nilai Marhaenisme pada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi persoalan infrastruktur dan dunia usaha, menjadi dasar daripada kader partai yang duduk dalam lembaga eksekutif maupun legislatif dalam memperjuangkan dan mensejahterakan wong cilik dalam bidang pembangunan infrastruktur dan perekonomian yang sepenuhnya harus berpihak kepada kaum Marhaen. Bagi PDI Perjuangan persoalan infrastruktur memastikan bagaimana infrastruktur ini benar-benar sampai ke kantong-kantong ekonomi dan dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti pembangunan sekolah, jalan dan jembatan, sering kali kita garis bawahi infrastrukturnya tidak boleh infrastruktur untuk branding personal tapi infrastruktur yang langsung meraih kantong-kantong ekonomi rakyat. lalu kedua tentang dunia usaha dalam hal ini menginginkan agar para pelaku usaha benar-benar bisa berusaha atau berdagang dengan lancar dan itu bermanfaat bagi masyarakat kecil itu akan menggerakkan roda-roda ekonomi masyarakat para petani apalagi Jambi sendiri ada 80,93%

tenaga kerja informal sektor pertanian jadi itu adalah poin yang diutamakan dalam menerapkan berbagai kebijakan kita untuk masyarakat berlandaskan dengan semangat marhaenis itu tadi (Ratu, 2022).

Sebagai partai politik, PDI Perjuangan memiliki peranan penting dalam membumikan Nilai-nilai Marhaenisme yang termaktub dalam Pancasila. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi berkomitmen untuk secara konsisten memperjuangkan kaum Marhaen dan wong cilik yang menjadi roh dari partai. Dalam konteks itu, PDI Perjuangan sebagai partai terus memperjuangkan agar negara wajib menjamin rakyat terlibat dalam kegiatan ekonomi sebagai bentuk pengejawantahan dari konsep berdikari di bidang ekonomi yakni dengan mendorong akses dan kepemilikan rakyat terhadap permodalan, informasi dan pasar demi memperkuat Usaha Kecil dan Menengah, mengembangkan industri kreatif serta menggalakkan usaha mikro keci menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal itu diungkapkan oleh Bapak Edi Purwanto sebagai berikut: “program kami yang bersentuhan langsung dengan marhaenisme salah satunya adalah pengembangan perekonomian masyarakat terutama masyarakat kecil. Nama programnya itu Berdikari di Bidang Ekonomi: Transformasi Struktural untuk Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial Serta Pembangunan yang berkelanjutan. Satu contoh realisasi yang dilakukan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi adalah dengan membantu peningkatan kapasitas UMKM dan pemberdayaan kelompok ekonomi produktif. Kegiatan ini lebih ke pelatihan dan pendampingan kepada kelompok tani serta pengadaan alat produksi untuk usaha agar bisa membuat atau menjadi UMKM yang produktif tidak hanya berfokus kepada pertanian akan tetapi juga memiliki life skill yang dapat menambah kemampuan diri”.

Selain itu, Peran PDI Perjuangan dalam meningkatkan perekonomian bagi masyarakat kecil di Provinsi Jambi adalah sebagai penghubung antara masyarakat kecil dengan pemilik modal ataupun pemerintah. partai politik adalah mata rantai yang

menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk mewujudkan keberpihakan PDI Perjuangan terhadap kaum Marhaen bentuk arahan DPD PDI Perjuangan kepada fraksi di DPRD Provinsi Jambi adalah dengan memfokuskan kepada indikator-indikator kesejahteraan yang berkaitan erat dengan semangat Marhaenis.

Melihat posisi PDI Perjuangan saat ini sebagai partai mayoritas di DPRD Provinsi Jambi, kader PDI Perjuangan yang duduk sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi menerapkan nilai-nilai Marhaenisme dengan melalui anggaran, reses, dan pokok-pokok pikirannya. Posisi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Jambi dimanfaatkan para petugas partai untuk menghadirkan kebijakan atau peraturan yang berpihak kepada kaum marhaen sesuai indikator dalam arahan DPD partai yang juga menampung aspirasi dari arus bawah untuk diperjuangkan oleh petugas partai sebagai bentuk disiplin ideologis di garis Marhaen.

PDI Perjuangan dengan kekuatan ideologis di uji dalam praktek. Sebagai partai yang setia di garis Marhaen harus menunjukkan satunya kata dan perbuatan. PDI Perjuangan sebagai partai Marhaen mengusung perubahan fundamental yang berkhidmat pada misi pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat (Donny, 2011) Untuk mempertegas keberpihakan partai terhadap kaum marhaen usul-usul pokok pikiran petugas partai di DPRD Provinsi Jambi wajib berpihak kepada kaum petani dan Pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Memperjuangkan Marhaen Dalam Posisi Politik Ketua DPRD

Firmanzah menjelaskan bahwa hubungan antara ideologi politik dengan kekuasaan sangat erat. Ideologi politik bisa menjadi tools atau instruments untuk mencapai kekuasaan. dalam dunia politik memainkan peranan penting untuk meningkatkan posisi tawar-menawar. Sangat jelas, pihak yang didukung oleh publik dan massa dalam jumlah besar akan mendapatkan basis legitimasi yang kuat, alias didukung rakyat

dan berhak mengatasnamakan kepentingan bersama. Selama periode pemilu, kontestan individu atau partai politik yang didukung oleh massa dalam jumlah besar berarti memiliki legitimasi yang lebih kuat. Dengan demikian, pihak yang mendapatkan banyak dukungan berhak keluar sebagai pemenang pemilu (Firmanzah, 2011).

Corak keberpihakan Ketua DPRD Provinsi Jambi terhadap Kaum Marhaen menguat saat PDI Perjuangan menjadi partai dengan kursi terbanyak pada DPRD Provinsi Jambi sejak tahun 2019 dan mengantarkan Bapak Edi Purwanto yang merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi menjadi Ketua DPRD Provinsi Jambi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Citra Darminto sebagai berikut: “Marhenis sudah masuk dalam garis perjuangan PDI Perjuangan, saya bisa jawab sudah. 2019 sudah mulai. apalagi semenjak Pak Edi Purwanto jadi Ketua DPRD itu coraknya sudah nampak, sudah muncul keberpihakan pada wong cilik. ruang Ketua DPRD ini sekarang siapa saja mau ketemu beliau, mau masuk bisa. itu agar apa? agar dekat dengan masyarakat, mendengar apa yang menjadi aspirasi, keluhan, kesah mereka itu lah bentuk dari semangat Marhaenis yang saya lihat”

Ketua DPRD dalam memperjuangkan kaum Marhaen dengan posisi politik yang dimiliki mengupayakannya dengan cara intervensi anggaran agar kebijakan serta anggaran dapat difokuskan kepada pembangunan sumber daya manusia, Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Edi Purwanto selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi. Intervensi anggaran dibidang pendidikan yang dilakukan oleh Ketua DPRD bertujuan agar peningkatan kualitas pendidikan denganberorientasikan pada upaya peningkatan skill pelajar yang akan berdampak pada terbentuknya mindset atau pola pikir pelajar ketika lulus yang tujuannya adalah generasi muda tidak lagi menganggur atau menjadi bagian dari kaum Marhaen. “Lalu juga contoh di mandatory spending

pendidikan 20% gitu kan kami upayakan bagaimana pendidikannya itu yang berbasis life skill Masa habis sekolah/kuliah gak dapat kerja, kalau gak dapat kerja habis tu miskin akhirnya kan melakukan apapun bukannya membantu memerdekakan Kaum Marhaen malah jadi Kaum Marhaen pula. Nah sehingga gimana caranya agar yang 20% itu bukan sekadarnya saja tetapi harus betul-betul ada manfaatnya makanya saya usul untuk berbasis life skill sehingga outputnya lulusan bisa mandiri gak perlu kerja di tempat orang lagi bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan baru, nah itu semangat Marhaenisme hadirnya sebuah kemandirian bangsa”

Intervensi anggaran yang diperjuangkan oleh Ketua DPRD pada bidang pendidikan adalah bentuk penerapan nilai-nilai Marhaenis agar kualitas pendidikan bisa menekan angka pengangguran di Provinsi Jambi dan perekonomian masyarakat bisa meningkat untuk kemandirian. Selain itu dalam menanggapi aspirasi kelompok petani muda di Kecamatan Pal Merah yang ingin berdikari secara ekonomi, Ketua DPRD Provinsi Jambi memfasilitasi kelompok tani tersebut dengan menginisiasi Green Farming sayuran hidroponik yang dianggarkan melalui APBD. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Edi Purwanto sebagai berikut: “saya sekarang bersama karang taruna di paal merah lingkaran selatan saya dorong bikin hidroponik, anak-anak muda semua itu saya fasilitasi APBD. mereka bikin dan sudah penen raya dua kali.

Tantangan Penerapan Nilai-Nilai Sosio-Nasionalisme Dan Sosio-Demokrasi Dalam Marhaenisme Pada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi

Melihat bahwa tantangan dalam penerapan nilai-nilai Marhaenisme di DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi adalah Kemampuan kader maupun anggota PDI Perjuangan Provinsi Jambi dalam mengidentifikasi tindakan-tindakan ideologis yang sesuai dengan perkembangan zaman masih sangat minim, akan tetapi usaha untuk

meningkatkan kemampuan tersebut sangat tinggi melalui Pendidikan dan pelatihan ideologi. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Ratu Munawaroh sebagai berikut: “yang pertama tentu adalah sebetulnya karena ketidapahaman saja dan itu hal yang wajar. Tetapi hal tersebut tidak dibiarkan menguap begitu saja. partai lewat ajaran-ajaran seperti yang saya dapatkan ada mata pelajaran mengenai nilai-nilai Marhaenisme itu mulai dari sejarahnya lalu Pancasila 1 Juni 1945 dan itu tidak hanya berlaku untuk sekolah calon kepala daerah tapi juga untuk setiap kader yang mengikuti pendidikan kader berjenjang pasti ada materi Marhaenisme dan itu jelas di AD ART disebutkan bahwa Marhaenisme teori perjuangan adalah salah satu bahan ajaran ideologi partai. nah inilah yang menjadikan kenapa PDI Perjuangan dapat penghargaan ISO 9001:2015 itu karena terstruktur dengan baik regulasi dan administrasinya termasuk juga bagaimana nilai-nilai Ideologi Pancasila termasuk Marhaenisme bisa betul-betul menjadi sebuah hal yang sangat di tanamkan pada hati seluruh kader PDI Perjuangan dalam menjalankan partai”

Tantangan lain juga perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang cepat merupakan tantangan tersendiri bagi partai. tantangan datang ketika usaha untuk mematerialkan ideologi harus selalu diupayakan agar sesuai konteks ruang dan waktu yang ada. Sementara itu para kader dan anggota bahkan belum selesai dalam memahami ideologi Marhaenisme dalam hal konseptual sehingga usaha pencapaian cita-cita perjuangan dinilai semakin berat dan membutuhkan usaha lebih. Penguatan ideologi merupakan suatu keniscayaan, karena makin maraknya pelaku politik dan pemilih yang pragmatis. Dengan adanya penguatan ideologi spekulatif, tapi berdasarkan prinsip-prinsip (ideologi yang kuat). Disamping itu pemilih tidak bingung dalam menentukan pilihannya, karena diharapkan pemecahan persoalan negara tidak dilakukan secara masyarakat pemilih yang cerdas akan memilih partai yang mempunyai visi, misi dan program yang sesuai dengan keyakinan ideologi pemilih.

Ideologi yang baik adalah ideologi yang berperan dalam kemajuan bangsa dan negara. Ideologi partai politik dalam hal ini marhaenisme dalam penerapannya di DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi harus diterima dan dipahami oleh kader partai termasuk para petugas partai yang ada di DPRD Provinsi Jambi. Petugas partai mengandalkan masa reses untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang nantinya akan di input ke dalam pokir. Aspirasi yang telah dimasukkan ke dalam pokir selanjutnya menjadi usulan kepada pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini eksekutif sebagai eksekutor yang merealisasikannya. Sehingga terkadang terdapat usul-usul dari Fraksi PDI Perjuangan yang usulannya di dominasi terhadap kebutuhan-kebutuhan kelompok tani tidak semua bisa terealisasikan.

Berdasar pada kondisi tersebut membuat PDI Perjuangan di Provinsi Jambi harus selalu melakukan penyesuaian dalam penerapan Marhaenisme agar sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Selain itu, PDI Perjuangan Provinsi Jambi juga dituntut oleh kemajuan zaman yang ada agar memiliki konsistensi dalam menerjemahkan dasar perjuangan yang berpihak pada wong cilik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan dengan melibatkan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi dan Kader DPC GMNI Jambi, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Marhaenisme yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi adalah berupa arahan dan perintah yang selanjutnya diberikan kepada petugas partai. Kader PDI Perjuangan memahami bahwa bahwa asas partai yang tercantum dalam AD/ART adalah Pancasila 1 Juni 1945 dengan nilai Marhaenisme sebagai intisari dari lima prinsip pokok dalam Pancasila 1 Juni 1945. PDI Perjuangan mengartikan partai sebagai wadah untuk membentuk kader bangsa yang memiliki kemampuan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arahan dan

perintah yang diberikan oleh DPD Partai selanjutnya di jalankan dan diperjuangkan oleh petugas partai di DPRD Provinsi Jambi sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Hadirnya perda disabilitas serta pansus konflik lahan adalah inisiasi dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai bentuk semangat dan keberpihakan kepada kaum Marhaen. Selain itu Ketua DPRD sebagai petugas partai mendorong bagaimana masyarakat bisa hidup dalam kemandirian. Marhaenisme memiliki tantangan dalam usaha menerapkannya, yaitu terdapat di dalam kader atau anggota PDI Perjuangan Provinsi Jambi. Kemampuan kader maupun anggota PDI Perjuangan Provinsi Jambi dalam mengidentifikasi tindakan-tindakan ideologis Marhaenis yang sesuai dengan perkembangan zaman masih sangat minim, usaha untuk meningkatkan kemampuan tersebut sangat tinggi melalui Pendidikan kader berjenjang selain itu kurangnya kepala daerah di Provinsi Jambi dari PDI Perjuangan menjadi tantangan karena realisasi atau eksekutor pada kebijakan yang telah dirumuskan adalah ranah dari eksekutif. PDI Perjuangan saat ini hanya mengandalkan kekuatan petugas partai di lembaga legislatif saja.

Seharusnya DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi juga memberikan arahan atau perintah yang konkret dalam memperjuangkan Kaum Marhaen kepada kader partai yang tidak berada di kekuasaan sehingga PDI Perjuangan menjadi partai yang berkualitas dan berpihak pada rakyat kecil. Selain itu juga bisa menjadi sarana untuk merawat hubungan partai dengan masyarakat di akar rumput dan sebagai modal bagi PDI Perjuangan mendapatkan dukungan yang lebih banyak dan lebih kuat agar dapat mempertahankan posisinya sebagai partai pemenang pileg di pemilu-pemilu yang akan datang. Posisi partai penguasa di nasional dan di DPRD Provinsi Jambi adalah kesempatan bagi PDI Perjuangan untuk

membuat sistem yang itu dibuat, disusun dan dimaksudkan untuk menerapkan nilai-nilai Marhaen. Siapapun nanti Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Anggota DPR atau DPRD nya harus menerapkan itu sampai ke bawah dan harus dilandasi nilai-nilai marhaenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Asmaeny (2017) Dasar Negara Hubungan Pancasila, Marhaenisme, Marxisme dan Kapitalisme dalam Skema Politik Indonesia. Yogyakarta: RUAS Media.
- Budiardjo, Miriam (2008) Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Firmanzah (2011) Mengelola Partai Politik. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kaligis, Retor (2014) Marhaen dan Wong Cilik: Membedah Wacana Praktik Nasionalisme bagi Rakyat Kecil dari PNI sampai PDI Perjuangan. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Komarudin, Ujang (2016) Ideologi Partai Politik. Jakarta: RMBOOKS.
- Kweit, Grisez Mary dan Robert W Kweit (1981) Konsep dan Metode Analisa Politik. Jakarta: Bina Aksara.
- Melik, Sayuti (2018) Antara Marhaenisme dan Marxisme. Temanggung: Kendi.
- Sugiyono (2013) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono (2021) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Adityawarman (2018) Peran Fraksi Dalam Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Ciamis: Universitas Galuh, FISIP)
- Ardila Fitriani dan Sri Budi Eko Wardani (2013) Fungsi Ideologi dalam Partai Politik: Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Perumusan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tahun 2010-2011 (Depok: Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia)

- Gerald, Galang (2019) *Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS* (Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma)
- Karim, Navarin dan Darminto. Citra (2018) *Penguatan Ideologi dalam pembangunan politik: kasus koalisi partai pendukung di Provinsi Jambi* (Jambi: FISIPOL Universitas Jambi)
- Multizami, Ahmad Hasyemi (2016) *Persepsi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Semarang Terhadap Marhaenisme Sebagai Ideologi Perjuangan* (Semarang: Universitas Diponegoro)
- Faozan Amar, *PDI Perjuangan Konsisten di Jalan Ideologi*
<https://kumparan.com/faozan-amar/pdi-perjuangan-konsisten-di-jalan-ideologi-1v066yukWmR/full> diakses pada tanggal 14 Maret 2022
- Jambiberita.com, *Raih 9 Kursi, PDIP Pemenang Pemilu DPRD Provinsi Jambi*
jambiberita.com/read/2019/05/11/5949620/raih-9-kursi-pdip-pemenang-pemilu-dprd-provinsi-jambi-berikut-perolehan-suara-lengkap-parpol diakses pada tanggal 14 Maret 2022
 Jambiekspres.co.id,
- Mungkinkah PDIP Mencatat Sejarah Baru di Jambi
<https://jambiekspres.co.id/read/2020/12/09/39203/mungkinkah-pdip-mencatat-sejarah-baru-di-jambi-mungkinkah-golkar-mempertahankan-rekor-tak-pernah-kalah/> diakses pada tanggal 21 Maret 2022
- Markus Junianto Sihaloho dalam *Beritasatu.com, Partai PDI Perjuangan (PDIP)*
[95/partai-pdi-perjuangan-pdip](https://www.beritasatu.com/archive/110095/partai-pdi-perjuangan-pdip) Diakses pada tanggal 05 Maret 2022.
- Markus Junianto Sihaloho dalam *beritasatu.com, Pengalaman PDIP 10 Tahun Terakhir Bisa Jadi Model Penyeimbang Pemerintah*
www.beritasatu.com/nasional/179240/pengalaman-pdip-10-tahun-terakhir-bisa-jadi-model-penyeimbang-pemerintah diakses pada tanggal 21 Maret 2022
- Pdiperjuangan.id, *Pengurus DPP PDI Perjuangan*
pdiperjuangan.id/struktur-dpp diakses pada tanggal 18 Mei 2022
- Pdiperjuangan.id, *Tata Kelola Partai*
<https://pdiperjuangan.id/detail-article/841/tata-kelola-partai> diakses pada tanggal 20 Maret 2022
- Pdiperjuangan.id, *Visi dan Misi*
<https://pdiperjuangan.id/detail-article/107/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 14 Maret 2022